

JUKNIS – SOP – KODE ETIK - SATPOLPP

PERBUP TABALONG NO. 37, BD 2025/NO. 37, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

- Abstrak : - bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu adanya Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 121 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 08 Tahun 2018; PERDAKAB Tabalong No. 08 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 46 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan ini mengatur SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP. Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi: a. SOP penegakan Perda; dan b. SOP penegakan Perkada. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi: a. SOP deteksi dan cegah dini; b. SOP pembinaan dan penyuluhan; c. SOP patroli; d. SOP pengamanan; e. SOP pengawalan; f. SOP penertiban; dan SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kode Etik Pol PP bertujuan: a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat; b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; c. mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan d. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 10 November 2025.
- Lampiran : 44 hlm.